



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 271/MENKES/SK/VIII/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 008/MENKES/SK/I/2012 TENTANG
ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/Menkes/SK/II/2012;
- b. bahwa untuk memperkuat pencapaian program pembangunan kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota Tahun 2012, diperlukan penyesuaian alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012, dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 008/MENKES/SK/I/2012 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Mengubah Ketentuan Lampiran I angka III dan Lampiran III angka III, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/Menkes/SK/II/ 2012, menjadi sebagai berikut:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

1. Ketentuan Lampiran I angka III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN **Rp 4.052.139.315.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah tahun 2012 disediakan dana sebesar Rp4.052.139.315.000,- yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp124.189.315.000,-, Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp2.369.500.000.000,- dan dana dari APBN-P untuk Tugas Pembantuan sebesar Rp1.558.450.000.000,-.

Dana Dekonsentrasi ini dialokasikan untuk mencapai sasaran program pembinaan upaya kesehatan, yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit/laboratorium kesehatan di daerah, dengan memperhatikan menu wajib dan atau menu pilihan.

Menu wajib terdiri dari :

1. Pertemuan konsultasi perencanaan dan monitoring dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) program bina upaya kesehatan (BUK) antara Ditjen Bina Upaya Kesehatan dengan dinas kesehatan provinsi.
2. Pertemuan konsolidasi perencanaan dan monitoring dan evaluasi program BUK oleh dinas kesehatan provinsi kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota.
3. Pertemuan advokasi dan sosialisasi *e-Planning* program BUK oleh dinas kesehatan provinsi kepada dinas kesehatan kabupaten/ kota, rumah sakit provinsi/kabupaten/kota dan sarana kesehatan lainnya di wilayah binaannya.
4. Pertemuan SAI/SABMN Program BUK antara dinas kesehatan provinsi dengan rumah sakit/laboratorium kesehatan.
5. Monitoring dan evaluasi dan bimbingan teknis oleh dinas kesehatan provinsi ke rumah sakit/BLK (Balai Laboratorium Kesehatan).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Pertemuan konsolidasi perencanaan dan monitoring dan evaluasi DAK bidang kesehatan (DAK kesehatan dasar dan DAK kesehatan rujukan).
7. Peningkatan kemampuan teknis Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD).
8. Peningkatan kapasitas teknis manajemen puskesmas.
9. Peningkatan kemampuan teknis Pelayanan *Obstetri, Neonatal* dan *Emergency* Dasar (PONED).
10. Kegiatan peningkatan akses pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
11. Pertemuan koordinasi provinsi dan kabupaten dalam pengembangan pelayanan kesehatan di daerah termasuk masalah Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).

Menu pilihan terdiri dari :

1. Pelatihan keterampilan operator dalam pemeliharaan peralatan kesehatan di rumah sakit/puskesmas di wilayah binaannya.
2. Pengelolaan Satuan Kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dinas Kesehatan Provinsi Program Pembinaan Upaya Kesehatan dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah Vertikal (Satker Kantor Daerah program tersebut, termasuk laporan keuangan).
3. *Workshop* revitalisasi Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) dan Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
4. Revitalisasi/penerapan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) terintegrasi dengan Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) dalam mendukung percepatan pencapaian MDG's.
5. Peningkatan kemampuan teknis dan petugas kesehatan di puskesmas DTPK.
6. Peningkatan teknis manajemen bagi tenaga kesehatan di puskesmas.
7. Pertemuan Koordinasi program kesehatan usia lanjut (Usila).
8. Pertemuan Koordinasi program kesehatan indera.
9. Pertemuan Koordinasi program kesehatan gigi dan mulut.
10. Pertemuan Koordinasi program pelayanan darah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

11. Peningkatan program Pelayanan *Obstetri, Neonatal, Emergency* Dan Komprehensif (PONEK) di rumah sakit kabupaten/kota.
12. Bimbingan dan survei akreditasi rumah sakit
13. Peningkatan kapabilitas petugas instalasi pengolah limbah di fasilitas pelayanan kesehatan.
14. Peningkatan kapabilitas petugas pengelolaan pemeliharaan peralatan kesehatan.
15. Menuju bebas pasung (eliminasi kasus pasung)
16. Penguatan proses rujukan kesehatan jiwa

Tugas Pembantuan merupakan dana APBN yang didaerahkan untuk pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pemanfaatan dana tugas pembantuan di rumah sakit, BLK/laboratorium kesehatan daerah (pelayanan kesehatan rujukan), dinas kesehatan provinsi/ kabupaten/kota (pelayanan kesehatan dasar) dilaksanakan dengan memperhatikan urutan prioritas menu sebagai berikut :

A. Pelayanan Rujukan

1. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan.
 - a. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk peningkatan mutu pelayanan di kelas III rumah sakit dan puskesmas dalam mendukung program Jamkesmas/ Jampersal.
 - b. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk IGD rumah sakit
 - c. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk ICU/ICCU.
 - d. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk PONEK.
 - e. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan selain menu di atas harus menyertakan Surat Pernyataan Kepala Daerah disertai dengan telaah terhadap urgensinya.
2. Khusus pembangunan gedung rumah sakit
 - a. Tidak diperbolehkan untuk gedung kantor, asrama, rumah dokter, rumah direktur, garasi, *workshop*, aula,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

masjid, jalan lingkungan/kompleks, parkir, pagar atau taman,

- b. Pengadaan peralatan non-medis (*meubelair*, lift, AC, *nurse call* dan lain-lain) hanya untuk kelengkapan gedung baru,
- c. Melanjutkan pembangunan yang sudah ada dan belum terselesaikan (dana pembangunan harus melalui sumber anggaran yang sama),
- d. Untuk pembangunan rumah sakit baru:
 - 1) Lahan harus siap bangun (pembebasan lahan, sertifikat tanah, pemerataan dan pemadatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat),
 - 2) Studi kelayakan dan *master plan* menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat.

B. Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan/ Puskesmas Perawatan mampu PONED.
2. Pembangunan Puskesmas baru beserta peralatannya.
3. Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan di Puskesmas Perawatan.

C. Hal-hal yang diperhatikan:

1. Pemanfaatan anggaran untuk fisik bangunan harus sampai berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan (azas manfaat),
2. Bila merupakan pembangunan lanjutan, harus jelas sumber anggaran pembangunan sebelumnya,
3. Bila membeli alat kesehatan harus sudah tersedia sarana penunjangnya (listrik, air, genset, bangunan pendukung, dan lain-lain),
4. Pengadaan alat kesehatan harus mempertimbangkan kemudahan dalam mekanisme hibah Barang Milik Negara (BMN),
5. Menyiapkan sistem pelaporan pelaksanaan sampai dengan penghibahan, segera setelah selesai pekerjaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan BPJS Kesehatan dan berfungsinya pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan dalam APBN-P TA. 2012 Ditjen Bina Upaya Kesehatan selain mengusulkan menu pemenuhan Tempat Tidur Kelas III dan rehabilitasi puskesmas maka dimungkinkan untuk mengusulkan pengadaan peralatan kesehatan sesuai standar.

2. Ketentuan Lampiran III angka III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

III. PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

a. Bersumber dari APBN

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I	PROVINSI ACEH				-
1	Kabupaten Pidie Jaya RSUD Kab. Pidie Jaya	9.000.000.000			9.000.000.000
2	Kabupaten Aceh Besar RS Satelit Indraputri	8.000.000.000			8.000.000.000
3	Kabupaten Aceh Utara RSUD Cut Meutia	25.000.000.000			25.000.000.000
4	Kabupaten Bireun RSUD Dr Fauziah	15.000.000.000			15.000.000.000
5	Kota Subulussalam RSIA Kota Subulussalam Aceh	9.500.000.000			9.500.000.000
JUMLAH:		66.500.000.000	-	-	66.500.000.000
II	SUMATERA UTARA				
1	Kabupaten Padang Lawas Utara RSUD Gunung Tua	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Kabupaten Langkat Dinkes Kabupaten Langkat	10.000.000.000			10.000.000.000
3	Kabupaten Humbang Hasundutan RSUD Doloksanggul	5.000.000.000			5.000.000.000
4	Kabupaten Simalungun RSUD Perdagangan	5.000.000.000			5.000.000.000
5	Kabupaten Madina RSUD Panyabungan	4.750.000.000			4.750.000.000
6	Kota Binjai Dinas Kesehatan Kota Binjai	8.850.000.000			8.850.000.000
7	Kabupaten Labuhan Batu Selatan RSUD Kota Pinang Labuhan Batu Selatan	16.000.000.000			16.000.000.000
8	Kota Tebing Tinggi RSUD Kumpulan Pane	5.000.000.000			5.000.000.000
9	Kota Tanjung Balai RSUD Dr Tengku Mansyur	10.000.000.000			10.000.000.000
10	Kota Medan RSUD Pirngadi Medan	5.000.000.000			5.000.000.000
11	Kabupaten Phakphak Barat RSUD Phakphak Barat	7.000.000.000			7.000.000.000
12	Kabupaten Labuhan Batu Selatan Dinkes Kab. Labuhan Batu Selatan	23.000.000.000			23.000.000.000
13	Kota Binjai RSUD Kota Binjai	14.000.000.000			14.000.000.000
JUMLAH:		118.600.000.000	-	-	118.600.000.000
III	RIAU				
1	Kabupaten Kampar RSUD Kabupaten Kampar	25.000.000.000			25.000.000.000
2	Kabupaten Indragiri Hulu Dinkes Kab. Indragiri Hulu	9.500.000.000			9.500.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
3	Kabupaten Rokan Hulu	Dinkes Rokan Hulu	15.000.000.000			15.000.000.000
4	Kabupaten Indragiri Hulu	RSUD Rengat Indragiri Hulu	12.500.000.000			12.500.000.000
JUMLAH:			62.000.000.000	-	-	62.000.000.000
IV	KEPULAUAN RIAU					
1	Kabupaten Karimun	Dinkes Kab. Karimun	1.000.000.000			1.000.000.000
2	Kabupaten Bintan	RSUD Kab. Bintan	25.000.000.000			25.000.000.000
3	Kabupaten Anambas	RSUD Kab. Anambas	5.000.000.000			5.000.000.000
4	Kabupaten Natuna	RSUD Natuna	7.500.000.000			7.500.000.000
JUMLAH:			38.500.000.000	-	-	38.500.000.000
V	SUMATERA BARAT					
1	Kabupaten Solok	Dinkes Kab Solok (Peningkatan 5 Puskesmas Perawatan)	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Kabupaten Solok	RSUD Aro Suka	5.000.000.000			5.000.000.000
3	Kota Padang	RSUD Rasidin	35.000.000.000			35.000.000.000
4	Kabupaten Sijunjung	Dinkes Kabupaten Sijunjung	15.000.000.000			15.000.000.000
JUMLAH:			65.000.000.000	-	-	65.000.000.000
VI	JAMBI					
1	Kota Jambi	RSUD Kota Jambi	15.000.000.000			15.000.000.000
2	Kabupaten Sarolangun	RSUD Prof Chatib Quzwain	8.000.000.000			8.000.000.000
3	Kabupaten Tebo	RSUD Kabupaten Tebo	6.900.000.000			6.900.000.000
4	Kabupaten Sarolangun	Dinkes Kabupaten Sarolangun	13.500.000.000			13.500.000.000
5	Kota Sungai Penuh	Dinkes Kota Sungai Penuh	9.500.000.000			9.500.000.000
6	Kabupaten Merangin	RSUD Kol. Abunjani Bangko	8.000.000.000			8.000.000.000
7	Kabupaten Bungo	RSUD H. Hanafie Muaro Bungo	7.000.000.000			7.000.000.000
8	Kabupaten Kerinci	RSUD M Thalib Kerinci	15.000.000.000			15.000.000.000
9	Kabupaten Muaro Jambi	Dinkes Kab. Muaro Jambi	15.000.000.000			15.000.000.000
10	Kabupaten Muaro Jambi	RSUD Sungai Bahar	15.000.000.000			15.000.000.000
11	Kabupaten Muaro Jambi	RSUD Sengeti Muaro	10.000.000.000			10.000.000.000
12	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	RSUD K.H Daud Arif Kuala Tungkal	12.750.000.000			12.750.000.000
13	Kota Jambi	RSUD Raden Mataher	30.000.000.000			30.000.000.000
14	Kab Kerinci	RSUD Kab. Kerinci (RS Baru)	30.000.000.000			30.000.000.000
JUMLAH:			195.650.000.000	-	-	195.650.000.000
VII	BENGKULU					
1	Kota Bengkulu	Dinkes Kota Bengkulu (Peningkatan Puskesmas)	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Provinsi Bengkulu	Dinkes Provinsi Bengkulu	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			10.000.000.000	-	-	10.000.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
VIII	SUMATERA SELATAN					
1	Kabupaten Musi Rawas	Dinkes Kabupaten Musi Rawas	25.000.000.000			25.000.000.000
2	Kabupaten OKU Timur	Dinkes OKU Timur	10.000.000.000			10.000.000.000
3	Kabupaten Muba	RSUD Bayunglincir	4.000.000.000			4.000.000.000
4	Kabupaten Muba	RSUD Sungaililin	4.000.000.000			4.000.000.000
5	Kabupaten Banyu Asin	RSUD Pangkalan Balai	4.500.000.000			4.500.000.000
6	Kabupaten Empat Lawang	Dinkes Kab. Empat Lawang	11.000.000.000			11.000.000.000
7	Kabupaten OKU Selatan	Dinkes Kab. Oku Selatan	9.000.000.000			9.000.000.000
8	Kota Pagar Alam	Dinkes Kota Pagar Alam	10.000.000.000			10.000.000.000
9	Kabupaten Muara Enim	RSUD Dr. H. Moh. Rabain	12.750.000.000			12.750.000.000
10	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Dinkes Kab. Ogan Komering Ilir	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			95.250.000.000	-	-	95.250.000.000
IX	BANGKA BELITUNG					
1	Kabupaten Bangka	RSUD Sungailiat	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Kabupaten Bangka Barat	Dinkes Kabupaten Bangka Barat	3.500.000.000			3.500.000.000
3	Kabupaten Bangka Barat	RSUD Sejiran Setason	9.000.000.000			9.000.000.000
JUMLAH:			17.500.000.000	-	-	17.500.000.000
X	LAMPUNG					
1	Kabupaten Lampung Timur	RSUD Sukadana	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Kota Bandar Lampung	Dinkes Kota Bandar Lampung	10.000.000.000			10.000.000.000
3	Kabupaten Lampung Tengah	Dinkes Kab. Lampung Tengah	15.000.000.000			15.000.000.000
4	Kabupaten Tanggamus	Dinkes Kab. Tanggamus	7.500.000.000			7.500.000.000
5	Kabupaten Tanggamus	RSUD Kota Agung	7.500.000.000			7.500.000.000
6	Kabupaten Lampung Selatan	Dinkes Kab. Lampung Selatan	10.000.000.000			10.000.000.000
7	Kabupaten Pringsewu	RSUD Pringsewu	10.000.000.000			10.000.000.000
8	Provinsi Lampung	Dinkes Provinsi Lampung	13.500.000.000			13.500.000.000
JUMLAH:			78.500.000.000	-	-	78.500.000.000
XI	BANTEN					
1	Kota Cilegon	RSUD Kota Cilegon	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Provinsi Banten	RS Rujukan Provinsi (Baru)	20.000.000.000			20.000.000.000
3	Kabupaten Pandeglang	RSUD Kabupaten Pandeglang	15.000.000.000			15.000.000.000
4	Provinsi Banten	RSUD Provinsi Labuan Pandeglang	11.000.000.000			11.000.000.000
5	Kabupaten Lebak	RSUD Ajidarmo Rangkasbitung	10.000.000.000			10.000.000.000
6	Provinsi Banten	RSUD Provinsi Malingping Lebak	3.000.000.000			3.000.000.000
7	Kota Tangerang Selatan	Dinkes Kota Tangerang Selatan	7.000.000.000			7.000.000.000
8	Kabupaten Tangerang	RSUD Kabupaten Tangerang Banten	20.000.000.000			20.000.000.000
JUMLAH:			96.000.000.000	-	-	96.000.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XII	JAWA BARAT					
1	Kabupaten Cirebon	RSUD Arja Winangun	8.000.000.000			8.000.000.000
2	Kota Cirebon	Dinkes Kota Cirebon	5.000.000.000			5.000.000.000
3	Kabupaten Majalengka	Dinkes Kabupaten Majalengka	2.000.000.000			2.000.000.000
4	Kabupaten Sukabumi	Dinkes Kabupaten Sukabumi	9.000.000.000			9.000.000.000
5	Kota Bandung	RSUD Ujung Berung	4.000.000.000			4.000.000.000
6	Kota Bandung	RSK Ibu dan Anak Astana Anyar	3.500.000.000			3.500.000.000
7	Kota Depok	Dinkes Kota Depok (PONED)	1.000.000.000			1.000.000.000
8	Kota Tasikmalaya	Dinkes Kota Tasikmalaya	10.000.000.000			10.000.000.000
9	Kabupaten Majalengka	RSUD Cideres	5.000.000.000			5.000.000.000
10	Kabupaten Indramayu	RSUD M.A Sentot Patrol	12.750.000.000			12.750.000.000
JUMLAH:			60.250.000.000	-	-	60.250.000.000
XIII	JAWA TENGAH					
1	Kabupaten Klaten	Dinkes Kabupaten Klaten	3.000.000.000			3.000.000.000
2	Kabupaten Sragen	RSUD Sragen	35.000.000.000			35.000.000.000
3	Kota Surakarta	RSUD Kota Surakarta	3.000.000.000			3.000.000.000
4	Kabupaten Purbalingga	RSUD Kabupaten Purbalingga	10.500.000.000			10.500.000.000
5	Kota Pekalongan	RSUD Bendan	9.000.000.000			9.000.000.000
6	Kabupaten Kebumen	RSUD Kabupaten Kebumen	15.000.000.000			15.000.000.000
7	Kabupaten Wonosobo	RSUD KRT. Setjonegoro	5.000.000.000			5.000.000.000
8	Kota Semarang	RSUD Tugu Semarang	8.000.000.000			8.000.000.000
9	Kabupaten Magelang	RSUD Muntilan	5.000.000.000			5.000.000.000
10	Kota Semarang	RSUD Ketileng	5.000.000.000			5.000.000.000
11	Kabupaten Sragen	Dinkes Kabupaten Sragen	8.500.000.000			8.500.000.000
12	Kabupaten Rembang	RSUD Dr.R.Soetrasno	5.000.000.000			5.000.000.000
13	Kabupaten Wonogiri	RSUD Dr Soediran Mangun Soemarso	15.000.000.000			15.000.000.000
14	Kabupaten Batang	Dinkes Kabupaten Batang	2.500.000.000			2.500.000.000
JUMLAH:			129.500.000.000	-	-	129.500.000.000
XIV	DI YOGYAKARTA					
1	Kota Yogyakarta	RS Jiwa Pakem	3.000.000.000			3.000.000.000
2	Kabupaten Kulonprogo	RSUD Wates	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			8.000.000.000	-	-	8.000.000.000
XV	JAWA TIMUR					
1	Kabupaten Bangkalan	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, Bangkalan Madura	7.000.000.000			7.000.000.000
2	Provinsi Jatim	Dinkes Provinsi Jatim	5.000.000.000			5.000.000.000
3	Kabupaten Lumajang	RSUD Kab. Lumajang	10.000.000.000			10.000.000.000
4	Kabupaten Jember	RSUD Dr Subandi Kab. Jember	5.000.000.000			5.000.000.000
5	Kabupaten Gresik	Dinkes Kab. Gresik	25.000.000.000			25.000.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA**

- 13 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
6	Kabupaten Trenggalek	RSUD Soedomo	5.000.000.000			5.000.000.000
7	Kabupaten Trenggalek	Dinkes Kab. Trenggalek	5.000.000.000			5.000.000.000
8	Kabupaten Bondowoso	RSUD Kusnadi	5.000.000.000			5.000.000.000
9	Kabupaten Tulung Agung	RSUD Dr Iskak Kab. Tulung Agung	13.000.000.000			13.000.000.000
10	Kabupaten Lamongan	RSUD Dr Soegiri	10.000.000.000			10.000.000.000
11	Kota Kediri	RSUD Gambiran	12.000.000.000			12.000.000.000
12	Kabupaten Pamekasan	RSUD Pamekasan	5.000.000.000			5.000.000.000
13	Kabupaten Malang	Dinkes Kabupaten Malang	9.500.000.000			9.500.000.000
14	Kabupaten Tulung Agung	Dinkes Kabupaten Tulung Agung	12.500.000.000			12.500.000.000
15	Kabupaten Probolinggo	Dinkes Kabupaten Probolinggo	10.000.000.000			10.000.000.000
16	Kabupaten Bondowoso	Dinkes Kabupaten Bondowoso	6.500.000.000			6.500.000.000
17	Kota Mojokerto	Dinkes Kota Mojokerto	7.500.000.000			7.500.000.000
18	Kabupaten Madiun	Dinkes Kabupaten Madiun	3.000.000.000			3.000.000.000
19	Kabupaten Jombang	Dinkes Kabupaten Jombang	7.000.000.000			7.000.000.000
20	Kabupaten Probolinggo	RSUD Tongas	5.000.000.000			5.000.000.000
21	Kabupaten Mojokerto	Dinkes Kabupaten Mojokerto	9.000.000.000			9.000.000.000
22	Kabupaten Mojokerto	RSUD Dr Soekandar Mojosari Mojokerto	9.500.000.000			9.500.000.000
23	Kabupaten Bojonegoro	RSUD Sumber Rejo Bojonegoro	9.000.000.000			9.000.000.000
24	Kabupaten Magelang	Dinkes Kab. Magetan	4.000.000.000			4.000.000.000
25	Kota Madiun	RSUD Sogaten Madiun	3.000.000.000			3.000.000.000
26	Kabupaten Malang	RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang	7.000.000.000			7.000.000.000
27	Kabupaten Mojokerto	RSUD RA Basoeni	9.500.000.000			9.500.000.000
JUMLAH:			219.000.000.000	-	-	219.000.000.000
XVI	KALIMANTAN BARAT					
1	Provinsi Kalimantan Barat	RS Jiwa Kalimantan Barat	9.000.000.000			9.000.000.000
2	Provinsi Kalimantan Barat	Dinkes Provinsi Kalimantan Barat	3.000.000.000			3.000.000.000
3	Kabupaten Ketapang	RSUD Agusdjam	5.000.000.000			5.000.000.000
4	Kabupaten Landak	RSUD Kabupaten Landak	7.000.000.000			7.000.000.000
5	Kota Pontianak	RSUD Kota Pontianak	35.000.000.000			35.000.000.000
6	Kabupaten Sambas	RSUD Pemangkat	5.000.000.000			5.000.000.000
7	Kabupaten Sambas	RSUD Sambas	4.500.000.000			4.500.000.000
8	Kabupaten Pontianak	RSUD Rubini Mempawah	10.000.000.000			10.000.000.000
9	Kabupaten Sekadau	RSUD Sekadau	8.500.000.000			8.500.000.000
10	Kabupaten Pontianak	Dinkes Mempawah	15.000.000.000			15.000.000.000
JUMLAH:			102.000.000.000	-	-	102.000.000.000
XVII	KALIMANTAN TENGAH					
1	Kabupaten Pulang Pisau	RSUD Kab. Pulang Pisau	10.000.000.000			10.000.000.000
JUMLAH:			10.000.000.000	-	-	10.000.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XVIII	KALIMANTAN TIMUR					
1	Kota Samarinda	RSUD IA Moeis	9.000.000.000			9.000.000.000
2	Kabupaten Penajam Pasir Utara	RSUD Penajam Pasir Utara	10.000.000.000			10.000.000.000
3	Kabupaten Nunukan	Dinkes Kab. Nunukan	2.000.000.000			2.000.000.000
JUMLAH:			21.000.000.000	-	-	21.000.000.000
XIX	KALIMANTAN SELATAN					
1	Kabupaten Tanah Bumbu	Dinkes Kab. Tanah Bumbu	7.000.000.000			7.000.000.000
2	Kabupaten Kota Baru	RSUD Kota Baru	10.000.000.000			10.000.000.000
JUMLAH:			17.000.000.000	-	-	17.000.000.000
XX	NUSA TENGGARA BARAT					
1	Kabupaten Dompu	RSUD Kabupaten Dompu	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Kabupaten Lombok Utara	RSUD Kab. Lombok Utara	10.000.000.000			10.000.000.000
3	Kabupaten Sumbawa Barat	Dinkes Kab. Sumbawa Barat	17.500.000.000			17.500.000.000
JUMLAH:			37.500.000.000	-	-	37.500.000.000
XXI	NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Kabupaten Manggarai	Dinkes Kab. Manggarai	7.000.000.000			7.000.000.000
2	Provinsi NTT	Dinkes Provinsi NTT	29.500.000.000			29.500.000.000
3	Kota Kupang	RSUD Kota Kupang	10.000.000.000			10.000.000.000
4	Kabupaten Sabu Rai Jua	Dinkes Kabupaten Sabu Rai Jua	10.000.000.000			10.000.000.000
5	Kabupaten Belu	RSUD Atambua Belu	35.000.000.000			35.000.000.000
6	Kabupaten Kupang	RSUD Kab. Kupang	35.000.000.000			35.000.000.000
7	Kabupaten Sabu Rai Jua	RSUD Sabu	7.500.000.000			7.500.000.000
8	Kabupaten Sikka	RSUD T.C Hillers	7.500.000.000			7.500.000.000
9	Kabupaten Flores Timur	RSUD Larantuka	7.500.000.000			7.500.000.000
JUMLAH:			149.000.000.000	-	-	149.000.000.000
XXII	BALI					
1	Kabupaten Jembrana	RSUD Kab. Jembrana	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Kota Denpasar	RSUD Wangaya Denpasar	8.000.000.000			8.000.000.000
3	Kabupaten Bangli	RSUD Bangli	7.000.000.000			7.000.000.000
4	Kabupaten Karangasem	Dinkes Kab. Karangasem	9.500.000.000			9.500.000.000
5	Kabupaten Karangasem	RSUD Karangasem	9.500.000.000			9.500.000.000
6	Kabupaten Tabanan	Dinkes Kab. Tabanan	10.000.000.000			10.000.000.000
7	Kabupaten Jembrana	Dinkes Kabupaten Jembrana	3.000.000.000			3.000.000.000
JUMLAH:			57.000.000.000	-	-	57.000.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XXIII	SULAWESI UTARA					
1	Kabupaten Minahasa Selatan	RSUD Amurang	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Kabupaten Minahasa (Induk)	RSUD Samratulangi	15.000.000.000			15.000.000.000
3	Provinsi Sulawesi Utara	BKMM Sulawesi Utara	7.000.000.000			7.000.000.000
4	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	RSUD Tagulandang Sitaro	7.000.000.000			7.000.000.000
5	Kabupaten Bolaang Mongondow	RSUD Datoe Binangkang	7.000.000.000			7.000.000.000
6	Kota Bitung	RSUD Bitung	5.000.000.000			5.000.000.000
7	Provinsi Sulawesi Utara	Labkes Provinsi Sulawaesi Utara	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			56.000.000.000	-	-	56.000.000.000
XXIV	GORONTALO					
1	Kabupaten Pohuwato	Dinkes Kab. Pahuwato	15.000.000.000			15.000.000.000
2	Kabupaten Gorontalo Utara	Dinkes Kab. Gorontalo Utara	10.000.000.000			10.000.000.000
JUMLAH:			25.000.000.000	-	-	25.000.000.000
XXV	SULAWESI TENGAH					
1	Kabupaten Poso	RSUD Kabupaten Poso	15.000.000.000			15.000.000.000
2	Kabupaten Buol	RSUD Kabupaten Buol	12.000.000.000			12.000.000.000
3	Kabupaten Sigi	Dinkes Kabupaten sigi	10.000.000.000			10.000.000.000
4	Kabupaten Luwuk Banggai	Dinkes Kabupaten Luwuk Banggai	9.000.000.000			9.000.000.000
5	Kabupaten Parigi Moutong	RSUD Anuntulako Parigi Moutong	11.500.000.000			11.500.000.000
6	Kabupaten Tojo Una Una	Dinkes Kab. Tojo Una Una	20.000.000.000			20.000.000.000
7	Kabupaten Tojo Una Una	RSUD Ampana	15.000.000.000			15.000.000.000
8	Kabupaten Banggai	RSUD Luwuk Banggai	15.000.000.000			15.000.000.000
9	Kabupaten Parigi Moutong	Dinkes Kabupaten Parigi Moutong	22.500.000.000			22.500.000.000
10	Kabupaten Toli-Toli	RSUD Mokopido	12.750.000.000			12.750.000.000
JUMLAH:			142.750.000.000	-	-	142.750.000.000
XXVI	SULAWESI BARAT					
1	Kabupaten Mamasa	RSUD Kab. Mamasa	20.000.000.000			20.000.000.000
2	Kabupaten Mamuju	RSUD Kab. Mamuju	15.000.000.000			15.000.000.000
3	Kabupaten Majene	RSUD Kab. Majene	5.000.000.000			5.000.000.000
4	Kabupaten Polewali Mandar	RSUD Polewali Mandar	25.000.000.000			25.000.000.000
JUMLAH:			65.000.000.000	-	-	65.000.000.000
XXVII	SULAWESI TENGGARA					
1	Kabupaten Wakatobi	RSUD Wakatobi	8.000.000.000			8.000.000.000
2	Kota Kendari	RSUD Abunawas	1.500.000.000			1.500.000.000
JUMLAH:			9.500.000.000	-	-	9.500.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XXVIII	SULAWESI SELATAN					
1	Kabupaten Luwu Utara	RSUD Kabupaten Luwu Utara	8.500.000.000			8.500.000.000
2	Kota Makassar	RSUD Sayang Rakyat	25.000.000.000			25.000.000.000
3	Kota Makassar	RSUD Fatimah Kota Makassar	8.000.000.000			8.000.000.000
4	Kabupaten Luwu Utara	Dinkes Kabupaten Luwu Utara	10.000.000.000			10.000.000.000
5	Kabupaten Luwu	RSUD Batara Guru	17.000.000.000			17.000.000.000
6	Kota Palopo	RSUD Rampoang Palopo	10.000.000.000			10.000.000.000
7	Kabupaten Sinjai	RSUD Sinjai	8.000.000.000			8.000.000.000
8	Kabupaten Bulukumba	Dinkes Kab. Bulukumba	9.000.000.000			9.000.000.000
9	Kabupaten Pinrang	RSUD Lasinrang	14.500.000.000			14.500.000.000
10	Kabupaten Enrekang	Dinkes Kabupaten Enrekang	14.500.000.000			14.500.000.000
11	Kabupaten Wajo	RSUD Kabupaten Wajo	14.500.000.000			14.500.000.000
12	Kabupaten Sidrap	RSUD Nene Malomo	14.500.000.000			14.500.000.000
13	Kabupaten Sidrap	RSUD Arifin Nu'Mang	14.500.000.000			14.500.000.000
14	Kabupaten Bantaeng	RSUD Prof Dr. H.M Anwar Makatutu	14.500.000.000			14.500.000.000
15	Kabupaten Gowa	RSUD Syech Yusuf	22.500.000.000			22.500.000.000
16	Kabupaten Maros	RSUD Salewangang	14.500.000.000			14.500.000.000
17	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	RSUD Kab. Pangkajene Kepulauan	24.500.000.000			24.500.000.000
18	Kabupaten Luwu Timur	RSUD I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur	14.500.000.000			14.500.000.000
19	Kabupaten Toraja Utara	Dinkes Kabupaten Toraja Utara	5.000.000.000			5.000.000.000
20	Kabupaten Kep. Selayar	RSUD Selayar	10.000.000.000			10.000.000.000
21	Kabupaten Jeneponto	RSUD Jeneponto	16.000.000.000			16.000.000.000
JUMLAH:			289.500.000.000	-	-	289.500.000.000
XXIX	MALUKU					
1	Kabupaten Seram Bagian Timur	RSUD Bula	6.000.000.000			6.000.000.000
2	Kabupaten Buru Selatan	RSUD Namrole	5.000.000.000			5.000.000.000
3	Kabupaten Pulau Buru	RSUD Namlea	6.000.000.000			6.000.000.000
JUMLAH:			17.000.000.000	-	-	17.000.000.000
XXX	MALUKU UTARA					
1	Kabupaten Sofifi	RSUD Dr. Chasan Boesoirie	6.000.000.000			6.000.000.000
2	Kota Ternate	Dinkes Kota Ternate (Peningkatan Puskesmas)	9.000.000.000			9.000.000.000
3	Kota Tidore	Dinkes Kota Tidore (Peningkatan Puskesmas)	6.000.000.000			6.000.000.000
4	Kabupaten Halmahera Barat	RSUD Jailolo	5.000.000.000			5.000.000.000
5	Kota Kepulauan Tidore	RSUD Kota Kepulauan Tidore/ Soa Sio	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			31.000.000.000	-	-	31.000.000.000
XXXI	PAPUA					
1	Kabupaten Paniai	RSUD Kab. Paniai	10.000.000.000			10.000.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
2	Provinsi Papua	Dinkes Provinsi Papua	20.000.000.000			20.000.000.000
3	Kabupaten Asmat	RSUD Asmat	7.000.000.000			7.000.000.000
4	Kabupaten Boven Digul	RSUD Boven Digul	10.000.000.000			10.000.000.000
5	Kabupaten Yahukimo	RSUD Dekai Yahukimo	7.500.000.000			7.500.000.000
6	Kota Jayapura	RSUD Abepura Jayapura	8.500.000.000			8.500.000.000
JUMLAH:			63.000.000.000	-	-	63.000.000.000
XXXII	PAPUA BARAT					
1	Kabupaten Fak Fak	RSUD Fak Fak	17.000.000.000			17.000.000.000
JUMLAH:			17.000.000.000	-	-	17.000.000.000
JUMLAH I S/D XXXII (SELURUH INDONESIA)			2.369.500.000.000	-	-	2.369.500.000.000

b. Bersumber dari APBN-P

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
I	ACEH					
1	Kabupaten Pidie Jaya	RSUD Kabupaten Pidie Jaya	4.000.000.000			4.000.000.000
		Dinas Kesehatan Pidie Jaya	4.000.000.000			4.000.000.000
2	Kota Langsa	Dinkes Langsa	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			13.000.000.000	-	-	13.000.000.000
II	SUMATERA UTARA					
1	Kabupaten Samosir	RSUD Hadrianus Sinaga	5.000.000.000			5.000.000.000
		Dinkes Kabupaten Samosir	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Kabupaten Dairi	RSUD Sidikalang	5.000.000.000			5.000.000.000
3	Kabupaten Tapanuli Utara	RSUD Tarutung	9.000.000.000			9.000.000.000
		Dinkes Tarutung	5.000.000.000			5.000.000.000
4	Kabupaten Tapanuli Selatan	RSUD Sipirok	10.000.000.000			10.000.000.000
5	Kota Sibolga	RSUD Ferdinand Lumban Tobing	10.000.000.000			10.000.000.000
		Dinkes Kota Sibolga	5.000.000.000			5.000.000.000
6	Kota Tanjung Balai	RSUD Dr. Tengku Mansyur	5.000.000.000			5.000.000.000
7	Kabupaten Madina	RSUD Panyabungan	17.000.000.000			17.000.000.000
8	Kabupaten Serdang Bedagai	RSUD Sultan Sulaiman	5.000.000.000			5.000.000.000
9	Kota Gunung Sitoli	Dinkes Kota Gunung Sitoli	10.000.000.000			10.000.000.000
10	Kabupaten Asahan	Dinkes Kabupaten Asahan	7.000.000.000			7.000.000.000
11	Kabupaten Labuhan Batu	Dinkes Kabupaten Labuhan Batu	10.000.000.000			10.000.000.000
12	Kabupaten Nias Utara	Dinkes Kabupaten Nias Utara	3.000.000.000			3.000.000.000
JUMLAH:			116.000.000.000	-	-	116.000.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
III	RIAU					
1	Kabupaten Rokan Hulu	RS Rokan Hulu	20.000.000.000			20.000.000.000
2	Provinsi Riau	Dinkes Provinsi Riau	2.000.000.000			2.000.000.000
JUMLAH:			22.000.000.000	-	-	22.000.000.000
IV	KEPULAUAN RIAU					
1	Provinsi Kepulauan Riau	RSUD Tanjung Uban	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			5.000.000.000	-	-	5.000.000.000
V	SUMATERA BARAT					
1	Kabupaten Solok	RSUD Arosuka	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Kota Payakumbuh	RSUD Adnan WD	10.000.000.000			10.000.000.000
3	Kabupaten Sijunjung	RS Kabupaten Sijunjung	15.000.000.000			15.000.000.000
4	Kota Padang	RSUD Rasidin	30.000.000.000			30.000.000.000
5	Kabupaten Pasaman Barat	RSUD Pasaman Barat	10.000.000.000			10.000.000.000
6	Kabupaten Agam	RS Lubuk Basung Agam	16.900.000.000			16.900.000.000
JUMLAH:			86.900.000.000	-	-	86.900.000.000
VI	JAMBI					
1	Kabupaten Bungo	RSUD Hanafie Muaro Bungo	13.000.000.000			13.000.000.000
		Dinkes Kabupaten Bungo	8.200.000.000			8.200.000.000
2	Kabupaten Muaro Jambi	RSUD Sangeti Kabupaten Muaro Jambi	10.000.000.000			10.000.000.000
3	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	RSUD Nurdin Hamzah	10.000.000.000			10.000.000.000
		Dinkes Kabupaten Tanjung Jabung Timur	5.000.000.000			5.000.000.000
4	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	RSUD Daud Arif	13.000.000.000			13.000.000.000
5	Kota Jambi	RSUD H. Abdul Manaf	15.000.000.000			15.000.000.000
6	Provinsi Jambi	RSUD R. Mataher	30.000.000.000			30.000.000.000
7	Kabupaten Sarolangun	RSUD Prof. H. M Chatib Quzwain	15.000.000.000			15.000.000.000
		Dinkes Kabupaten Sarolangun	7.700.000.000			7.700.000.000
8	Kabupaten Kerinci	RSUD Mayjen H.A Thalib Kerinci	13.500.000.000			13.500.000.000
9	Kabupaten Tebo	Dinkes Kabupaten Tebo	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			145.400.000.000	-	-	145.400.000.000
VII	BENGKULU					
1	Kabupaten Bengkulu Utara	RSUD Arga Makmur	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Kabupaten Kaur	RSUD Kabupaten Kaur	10.000.000.000			10.000.000.000
JUMLAH:			20.000.000.000	-	-	20.000.000.000
VIII	SUMATERA SELATAN					
1	Kabupaten Empat Lawang	RSUD Kabupaten Empat Lawang	4.000.000.000			4.000.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
		Dinkes Kabupaten Empat Lawang	4.000.000.000			4.000.000.000
2	Kabupaten OKU Timur	RSUD Martapura	5.000.000.000			5.000.000.000
3	Kabupaten Ogan Komering Ilir	RSU Kayu Agung	5.000.000.000			5.000.000.000
4	Kota Lubuk Linggau	RS Siti Aisyah	20.000.000.000			20.000.000.000
5	Kabupaten Banyuasin	Dinkes Kabupaten Banyuasin	8.000.000.000			8.000.000.000
6	Kota Palembang	Dinkes Kota Palembang	9.200.000.000			9.200.000.000
JUMLAH:			55.200.000.000	-	-	55.200.000.000
IX	LAMPUNG					
1	Kota Metro	RSUD A. Yani	7.000.000.000			7.000.000.000
2	Kabupaten Lampung Tengah	RSUD Demang Sepulau Raya	3.000.000.000			3.000.000.000
3	Kabupaten Lampung Selatan	RSUD Kalianda	3.000.000.000			3.000.000.000
4	Kota Bandar Lampung	RSUD dr. S. Dadi Tjokrodipo	15.500.000.000			15.500.000.000
5	Kabupaten Lampung Utara	Dinkes Lampung Utara	5.000.000.000			5.000.000.000
6	Kabupaten Lampung Selatan	Dinkes Lampung Selatan	8.000.000.000			8.000.000.000
7	Kabupaten Tanggamus	Dinkes Kabupaten Tanggamus	6.000.000.000			6.000.000.000
JUMLAH:			47.500.000.000	-	-	47.500.000.000
X	BANTEN					
1	Kabupaten Tangerang	RSUD Kabupaten Tangerang	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Kota Tangerang Selatan	RSUD As Sholihin	8.000.000.000			8.000.000.000
3	Kabupaten Pandeglang	Dinkes Kabupaten Pandeglang	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			23.000.000.000	-	-	23.000.000.000
XI	JAWA BARAT					
1	Kabupaten Sukabumi	RSUD Sekarwangi	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Bandung	RS Bhayangkara, Sartika Asih	13.000.000.000			13.000.000.000
3	Kota Sukabumi	RSUD R. Syamsuddin SH	10.000.000.000			10.000.000.000
4	Kabupaten Ciamis	RSUD Kabupaten Ciamis	5.000.000.000			5.000.000.000
		Dinkes Kabupaten Ciamis	3.000.000.000			3.000.000.000
5	Kabupaten Tasikmalaya	RSUD Kabupaten Tasikmalaya	10.000.000.000			10.000.000.000
JUMLAH:			51.000.000.000	-	-	51.000.000.000
XII	JAWA TENGAH					
1	Kabupaten Banjarnegara	RSUD Kabupaten Banjarnegara	7.000.000.000			7.000.000.000
		Dinkes Kabupaten Banjarnegara	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Kota Magelang	RSUD Tidar	9.000.000.000			9.000.000.000
3	Kabupaten Batang	RSUD Kabupaten Batang	5.000.000.000			5.000.000.000
4	Kabupaten Kendal	RS Tanpa Kelas	8.000.000.000			8.000.000.000
5	Kabupaten Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung	5.000.000.000			5.000.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
6	Kabupaten Pekalongan	RSUD Kraton Pekalongan	25.000.000.000			25.000.000.000
7	Provinsi Jawa Tengah	RSUD Dr. Moewardi	10.000.000.000			10.000.000.000
		RSUD Tugurejo	10.000.000.000			10.000.000.000
8	Kabupaten Banyumas	RSUD Banyumas	25.000.000.000			25.000.000.000
		RSUD Ajibarang	6.800.000.000			6.800.000.000
		Dinkes Kabupaten Banyumas	9.000.000.000			9.000.000.000
9	Kabupaten Cilacap	RSUD Cilacap	10.000.000.000			10.000.000.000
10	Kabupaten Jepara	RSUD RA Kartini Jepara	10.000.000.000			10.000.000.000
11	Kota Salatiga	RSUD Salatiga	10.000.000.000			10.000.000.000
12	Kabupaten Magelang	RSUD Muntilan	7.000.000.000			7.000.000.000
		Dinkes Kabupaten Magelang	3.000.000.000			3.000.000.000
13	Kabupaten Pemalang	RSUD Dr. M. Ashari	4.500.000.000			4.500.000.000
JUMLAH:			169.300.000.000	-	-	169.300.000.000
XIII	JAWA TIMUR					
1	Kabupaten Bojonegoro	RSUD Sumber Rejo Bojonegoro	5.000.000.000			5.000.000.000
		RSUD Padangan	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Provinsi Jawa Timur	RSUD Dr. Soetomo	70.000.000.000			70.000.000.000
		RSUD Dr. Saiful Anwar, Malang	10.000.000.000			10.000.000.000
3	Kabupaten Jombang	RSUD Kabupaten Jombang	5.000.000.000			5.000.000.000
4	Kabupaten Probolinggo	RSUD Waluyojati Kraksaan	5.000.000.000			5.000.000.000
5	Kabupaten Banyuwangi	RSUD Blambangan	5.000.000.000			5.000.000.000
6	Kabupaten Ngawi	RSUD Dr. Soeroto Ngawi	10.000.000.000			10.000.000.000
7	Kabupaten Blitar	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	7.500.000.000			7.500.000.000
8	Kabupaten Trenggalek	RSUD Dr. Soedomo	7.500.000.000			7.500.000.000
9	Kabupaten Mojokerto	RSUD Prof. Dr. Soekandar Mojosari	9.000.000.000			9.000.000.000
10	Kabupaten Lamongan	RSUD Dr. Soegiri	5.000.000.000			5.000.000.000
11	Kabupaten Jember	RS. Dr. Soebandi	18.000.000.000			18.000.000.000
		RSUD Kalisat	5.300.000.000			5.300.000.000
12	Kabupaten Nganjuk	RS Kertosono	7.000.000.000			7.000.000.000
		Dinkes Kabupaten Nganjuk	4.000.000.000			4.000.000.000
13	Kabupaten Tulung Agung	RSUD Dr. Iskak	10.000.000.000			10.000.000.000
14	Kabupaten Sidoarjo	RSUD Kabupaten Sidoarjo	10.000.000.000			10.000.000.000
15	Kabupaten Bondowoso	RSUD Koesnadi Bondowoso	5.000.000.000			5.000.000.000
16	Kabupaten Situbondo	RSUD Abdul Rahim	5.000.000.000			5.000.000.000
17	Kabupaten Pacitan	RSUD Swadana Pacitan	7.300.000.000			7.300.000.000
18	Kabupaten Malang	RSUD Kanjuruhan Kepanjen	4.300.000.000			4.300.000.000
19	Kabupaten Magetan	RSUD Dr. Sayidiman	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			229.900.000.000	-	-	229.900.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XIV	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA					
1	Kota Yogyakarta	RSU Kota Yogyakarta	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Kabupaten Sleman	RSUD Kabupaten Sleman	7.000.000.000			7.000.000.000
3	Kabupaten Kulon Progo	RSUD Wates	7.000.000.000			7.000.000.000
		Dinkes Kabupaten Kulon Progo	6.000.000.000			6.000.000.000
JUMLAH:			25.000.000.000	-	-	25.000.000.000
XV	KALIMANTAN BARAT					
1	Kabupaten Melawi	RSUD Kabupaten Melawi (Nanga Pinoh)	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Kabupaten Bengkayang	RSUD Kabupaten Bengkayang	5.000.000.000			5.000.000.000
		Dinkes Kabupaten Bengkayang	2.000.000.000			2.000.000.000
3	Kabupaten Pontianak	RSUD Dr. Rubini Mempawah	11.000.000.000			11.000.000.000
4	Kota Singkawang	Dinkes Kota Singkawang	9.200.000.000			9.200.000.000
JUMLAH:			32.200.000.000	-	-	32.200.000.000
XVI	KALIMANTAN TENGAH					
1	Kabupaten Sampit	RSUD Dr. Murjani Sampit	20.000.000.000			20.000.000.000
2	Kabupaten Sukamara	RSUD Kabupaten Sukamara	12.500.000.000			12.500.000.000
3	Kabupaten Katingan	Dinkes Kabupaten Katingan	4.750.000.000			4.750.000.000
JUMLAH:			37.250.000.000	-	-	37.250.000.000
XVII	KALIMANTAN TIMUR					
1	Kabupaten Berau	Dinkes Kabupaten Berau	4.000.000.000			4.000.000.000
JUMLAH:			4.000.000.000	-	-	4.000.000.000
XVIII	KALIMANTAN SELATAN					
1	Kabupaten Tanah Bumbu	RSUD Amanah Husada	7.500.000.000			7.500.000.000
		Dinkes Kabupaten Tanah Bumbu	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Kabupaten Barito Kuala	Dinkes Kabupaten Barito Kuala	2.000.000.000			2.000.000.000
JUMLAH:			14.500.000.000	-	-	14.500.000.000
XIX	NUSA TENGGARA BARAT					
1	Kabupaten Lombok Timur	RSUD R. Sujono Selong	8.500.000.000			8.500.000.000
2	Kota Mataram	RSUD Kota Mataram	12.000.000.000			12.000.000.000
3	Kabupaten Dompu	RSUD Kabupaten Dompu	6.300.000.000			6.300.000.000
4	Kabupaten Lombok Utara	Dinkes Kabupaten Lombok Utara	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			31.800.000.000	-	-	31.800.000.000
XX	NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Kabupaten Manggarai	RSUD Ruteng	10.000.000.000			10.000.000.000



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
		Dinkes Manggarai	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Kabupaten Sumba Timur	RSUD Umbu Rara Meha Waingapu	9.000.000.000			9.000.000.000
3	Kabupaten Rote Ndao	RSUD Ba'a	4.000.000.000			4.000.000.000
4	Kabupaten Timor Tengah Selatan (SoE)	Dinkes Kabupaten Timor Tengah Selatan (SoE)	5.000.000.000			5.000.000.000
5	Kabupaten Ende	Dinkes Kabupaten Ende	9.400.000.000			9.400.000.000
6	Kabupaten Sumba Barat	Dinkes Kabupaten Sumba Barat	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			47.400.000.000	-	-	47.400.000.000
XXI BALI						
1	Kabupaten Karangasem	RSUD Kabupaten Karangasem	12.000.000.000			12.000.000.000
		Dinkes Kabupaten Karangasem	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Kabupaten Gianyar	RSUD Sanjiwani	7.500.000.000			7.500.000.000
JUMLAH:			29.500.000.000	-	-	29.500.000.000
XXII SULAWESI UTARA						
1	Kabupaten Sangihe	RSUD Liun Kendage Tahuna	7.000.000.000			7.000.000.000
2	Provinsi Sulawesi Utara	RSK Prof.dr. VL. Ratumbuang Sulawesi Utara	3.000.000.000			3.000.000.000
3	Kabupaten Sitaro	RSUD Lapangan Sawang	5.000.000.000			5.000.000.000
4	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	RSUD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			20.000.000.000	-	-	20.000.000.000
XXIII SULAWESI TENGAH						
1	Provinsi Sulawesi Tengah	RSUD Undata	10.000.000.000			10.000.000.000
		RS Jiwa Madani	2.600.000.000			2.600.000.000
2	Kota Palu	Dinkes Kota Palu	10.000.000.000			10.000.000.000
3	Kabupaten Donggala	RSUD Kabelota	7.000.000.000			7.000.000.000
4	Kabupaten Banggai	RSUD Luwuk Banggai	20.000.000.000			20.000.000.000
5	Kabupaten Parigi Moutong	RSUD Anuntaloka Parigi Moutong	15.000.000.000			15.000.000.000
6	Kabupaten Tojo Una-Una	RSUD Ampana	5.000.000.000			5.000.000.000
7	Kabupaten Buol	Dinkes Kabupaten Buol	10.000.000.000			10.000.000.000
JUMLAH:			79.600.000.000	-	-	79.600.000.000
XXIV SULAWESI BARAT						
1	Kabupaten Majene	RSUD Kabupaten Majene	15.000.000.000			15.000.000.000
2	Provinsi Sulawesi Barat	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	20.000.000.000			20.000.000.000
3	Kabupaten Mamuju Utara	RSUD Kabupaten Mamuju Utara	7.700.000.000			7.700.000.000
4	Kabupaten Mamuju	Dinkes Mamuju	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			47.700.000.000	-	-	47.700.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XXV	SULAWESI TENGGARA					
1	Kota Kendari	RSUD Abunawas	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Kabupaten Konawe Utara	Dinkes Konawe Utara	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			10.000.000.000	-	-	10.000.000.000
XXVI	SULAWESI SELATAN					
1	Provinsi Sulawesi Selatan	RSU Haji Makasar	12.500.000.000			12.500.000.000
		RSIA Pertiwi	3.000.000.000			3.000.000.000
		RSUD Labuang Baji	10.000.000.000			10.000.000.000
		RSUD Sayang Rakyat	10.000.000.000			10.000.000.000
2	Kabupaten Luwu Utara	RSUD Andi Djemma Masamba	5.000.000.000			5.000.000.000
3	Kota Palopo	RSUD Rampoang	5.000.000.000			5.000.000.000
		Dinkes Kota Palopo	20.000.000.000			20.000.000.000
4	Kabupaten Selayar	RSUD Selayar	10.000.000.000			10.000.000.000
5	Kota Pare-Pare	RSUD Andi Makassar	10.000.000.000			10.000.000.000
6	Kabupaten Luwu Timur	RSUD I Lagaligo	10.000.000.000			10.000.000.000
7	Kabupaten Tana Toraja	RSUD Tana Toraja	5.000.000.000			5.000.000.000
8	Kabupaten Luwu	RSUD Batara Guru Belopa	7.000.000.000			7.000.000.000
9	Kabupaten Pinrang	Dinkes Kabupaten Pinrang	19.800.000.000			19.800.000.000
10	Kabupaten Pangkep	Dinkes Kabupaten Pangkep	10.000.000.000			10.000.000.000
11	Kabupaten Enrekang	Dinkes Kabupaten Enrekang	5.000.000.000			5.000.000.000
12	Kabupaten Kep. Selayar	Dinkes Kabupaten Kep. Selayar	15.700.000.000			15.700.000.000
JUMLAH:			158.000.000.000	-	-	158.000.000.000
XXVII	GORONTALO					
1	Kabupaten Bone Bolango	RSUD Toto Kabila	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			5.000.000.000	-	-	5.000.000.000
XXVII I	PAPUA					
1	Kabupaten Timika	RSUD Kabupaten Timika	5.000.000.000			5.000.000.000
2	Kabupaten Merauke	RSUD Kabupaten Merauke	5.000.000.000			5.000.000.000
JUMLAH:			10.000.000.000	-	-	10.000.000.000
XXIX	PAPUA BARAT					
1	Kabupaten Fak Fak	RSUD Fak Fak	20.000.000.000			20.000.000.000
2	Kabupaten Manokwari	Dinkes Kabupaten Manokwari (Puskesmas Mansinam)	2.300.000.000			2.300.000.000
JUMLAH:			22.300.000.000	-	-	22.300.000.000
JUMLAH I S/D XXIX (SELURUH INDONESIA)			1.558.450.000.000	-	-	1.558.450.000.000



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
10. Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan
11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia